

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA MENARA TUJUH KAKI DIAN (Studi di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara)

Christian Aprilio Palendeng¹
Michael S. Mantiri²
Ismail Rachman³

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam mengembangkan Objek Wisata Menara Tujuh Kaki Dian. Objek wisata menara Tujuh Kaki Dian merupakan objek wisata religi dan menjanjikan sejuta pesona. Tempat rekreasi ini berada tepat di kaki gunung berapi Klabat dengan suguhan hijaunya pepohonan lebat. Menara Tujuh Kaki Dian ini di buat antara tahun 2011 dan selesai pada tahun 2012. Objek wisata ini memiliki tinggi 19 Meter dengan dominasi warna putih, sementara bangunan penyangga di bawahnya di cat berwarna kuning. Tujuh ujung kaki dian lengkap lampu bertenaga surya. Diameter bangunan ini berukuran 8x8 dan terpasang tulisan Minahasa Utara berukuran raksasa. Penelitian menggunakan metode penelitain kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Peran Pemerintah daerah melalui dinas pariwisata dalam mengembangkan objek dan daya Tarik wisata menara tujuh kaki dian Minahasa Utara, sejauh ini tidak maksimal karena keberadaan objek tersebut sekarang ini terkesan dibiarkan dan tidak diurus. Pergantian pemimpin, anggaran serta pandemic covid 19 menjadi alasan kurangnya perhatian dinas pariwisata terhadap pengembangan objek dan daya Tarik objek wisata. Keberdadaan sarana dan prasarana penunjang objek wisata di menara tujuh kaki dian masih dalam kondisi yang butuh perbaikan, pengelolaan objek sebagian ditangani oleh PD Klabat selaku BUMD Minahasa Utara yang mengelola kebersihan dan parker.

Kata Kunci : Peran, Pemerintah, Objek Wisata, Menara Tujuh Kaki Dian

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kepariwisata ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Pemberian otonomi luas kepada daerah melalui undang-undang pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka pembagian urusan antara pemerintah dan pemerintah daerah terbagi seperti yang ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), sebagai berikut :

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum;
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Lebih lanjut, urusan pemerintahan

konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Sedangkan pariwisata merupakan urusan yang termasuk dalam Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara melalui SKPD Dinas Pariwisata yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi untuk mengembangkan objek Menara Tujuh Kaki Dian.

Pembangunan pariwisata umumnya dilakukan oleh sektor swasta terutama pembangunan fasilitas dan jasa pariwisata. Namun, pengadaaan infrastruktur umum seperti jalan, listrik dan air yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata terutama untuk proyek-proyek yang berskala besar yang memerlukan dana yang sangat besar seperti pembangunan bandar udara, jalan untuk transportasi darat, proyek penyediaan air bersih, dan proyek pembuangan limbah merupakan tanggung jawab pemerintah. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai penjamin dan pengawas para investor yang menanamkan modalnya dalam bidang pembangunan pariwisata. Namun pada objek wisata menara tujuh kaki dian sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah melalui dinas pariwisata.

Menara Kaki Dian merupakan salah satu obyek wisata religi di Kabupaten Minahasa Utara. Lokasi wisata ini terletak di kaki Gunung Klabat pada ketinggian sekitar 600 m dari permukaan laut. Terdapat juga beberapa bangunan pendukung, seperti 2 pendopo yang berada di samping kiri dan kanan. Kaki Dian sendiri memiliki tinggi 19 m dengan dasar menara seluas 8 x 8 meter. Menara Kaki Dian memiliki 7 cabang lampu sebagaimana lambang dan peralatan rohani

yang tercantum dalam Alkitab. Letaknya yang sangat strategis membuat monumen tersebut terlihat dengan sangat jelas dari Airmadidi dan sekitarnya. Dari Kaki Dian, pengunjung dapat melihat dengan sangat jelas panorama Kota Manado, Teluk Manado dan pulau-pulau di sekelilingnya.

Objek wisata Menara Kaki Dian merupakan perpaduan antara objek wisata alam dan wisata buatan, dapat dikatakan wisata alam karena objek wisata ini mengandalkan pemandangan alam dari ketinggian dan dikatakan wisata buatan karena yang menjadi objek andalan disini adalah menara tujuh kaki dian terbesar didunia yang dibuat oleh manusia.

Sejarahnya, Menara tujuh Kaki Dian diambil dari sebuah istilah yang merujuk kepada pelita atau kandil di Alkitab, oleh karena itulah tempat wisata Kaki Dian bisa dikatakan sebagai tempat wisata religius untuk umat Kristen. Lokasi wisata ini dibangun pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2012 oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Di dekatnya, terpasang tulisan tulisan Minahasa Utara berukuran raksasa, pembangunan menara kaki dian ini diproyeksikan menjadi yang terbesar dan tertinggi di dunia. Sampai saat ini menurut data awal yang didapat peneliti dari dinas pariwisata Kabupaten Minahasa Utara bahwa penanggungjawab serta pengembang kawasan menara kaki dian adalah pemerintah kabupaten dimana dinas pariwisata sebagai penanggungjawabnya.

Namun belakangan ini, objek wisata Menara Tujuh Kaki Dian mulai dilupakan dan jarang dikunjungi oleh wisatawan. Sebenarnya Letak objek wisata Menara Tujuh Kaki Dian yang dekat dengan pusat Kabupaten Minahasa Utara membuatnya cukup strategis akan tetapi hal ini tidak didukung dengan *layout* pengelolaan sarana prasarana pariwisata yang baik, diantaranya kondisi jalan tangga yang tidak mendukung ketika menuju ke puncak, tempat peristirahatan terbatas, kamar kecil tidak memadai serta tempat sampah terbatas (tidak ada pembuangan sampah sehingga banyak sampah berserakan, seharusnya ada tempat

pembuangan sampah). Hal ini disebabkan oleh karena pengelolaan dan tata letak (*layout*) sarana prasarana tidak dapat berjalan secara optimal. Dalam rangka pengembangan dan perbaikan masalah tersebut tentunya tidak terlepas dari peran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melalui Dinas Pariwisata.

Peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata seharusnya merawat, melestarikan serta mengelola dengan baik setiap sarana dan prasarana penunjang objek wisata tersebut sesuai dengan tupoksi yang berlaku, namun sejauh ini peran dari dinas sendiri belum terlihat mampu dalam mendongkrak dalam mengelola objek wisata tersebut sehingga pengunjung dan terlihat kalah jauh dari objek wisata lainnya yang dimiliki oleh swasta di Kabupaten Minahasa Utara bahkan yang ada di daerah lain di Sulawesi Utara. Oleh sebab itu keberadaan pemerintah dalam pengembangan objek wisata di Kabupaten Minahasa Utara sangat penting. Sangat berbeda dengan objek wisata lainnya yang memiliki strategi yang baik dan tentu saja menyesuaikan dengan kondisi/ keinginan pengunjung saat ini.

Tinjauan Pustaka Konsep Peran

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya.

Mengenai peranan ini, Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2008:45), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut :

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan
- b. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public support*). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham

- bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
 - d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kerancuan (*biasess*).
 - e. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Konsep Pariwisata

Definisi pariwisata menurut United Nation World Tourism organization (Antariksa 2016:19) :“ *Tourism comprises the activities of persons traveling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business, and other purposes* ”. (kepariwisataan meliputi berbagai aktivitas yang dilakukan oleh orang yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di suatu tempat diluar lingkungannya yang biasa, selama waktu tidak lebih dari satu tahun secara terus menerus, untuk rekreasi, kegiatan bisnis dan tujuan lainnya) . Di dunia internasional hanya mengenal istilah *tourism* sementara di Indonesia terdapat

banyak istilah

Pariwisata berasal dari bahasa *sanssekerta* “*pari*” yang berarti hal atau banyak melakukan dan kata “*wisata*” yang berarti perjalanan. Jadi pariwisata adalah perjalanan atau banyak melakukan perjalanan. Pengertian pariwisata menurut Salah Wahab (2003: 143) bahwa: Pariwisata merupakan perpindahan sementara organisasi dari bermacam-macam tempat tinggal, iman dan agama, dan yang mempunyai pola hidup yang berbeda, beragam harapan, banyak jenis kesukaan dan hal-hal yang tidak disukai, serta motivasi yang tidak dapat dibuat standarnya karena kesemuanya ini adalah ungkapan pikiran dan endapan perasaan serta tingkah laku yang berubah dalam jangka Panjang menurut tempat dan waktu.

Definisi pariwisata atau kepariwisataan (Nugroho 2012:329) memiliki ruang lingkup dan kegiatan yang sangat luas, setidaknya meliputi 5 jenis kegiatan meliputi:

- 1) Wisata bahari (*beach and sun tourism*)
- 2) Wisata pedesaan (*rural and agro tourism*)
- 3) Wisata alam (*natural tourism*)
- 4) Wisata budaya (*cultural tourism*)
- 5) Perjalanan bisnis (*business travel*)

Menurut Gamal Suwanto (2009: 27) istilah pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut dan untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan yang bersifat sementara yang dilakukan perorangan maupun kelompok untuk menikmati perjalanan tersebut dan untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Menara Kaki Dian merupakan salah satu obyek wisata religi di Kabupaten Minahasa Utara. Lokasi wisata ini terletak di kaki Gunung Klabat pada ketinggian sekitar 600 m dari permukaan laut. Terdapat juga beberapa bangunan pendukung, seperti 2

pendopo yang berada di samping kiri dan kanan. Kaki Dian sendiri memiliki tinggi 19 m dengan dasar menara seluas 8 x 8 meter. Menara Kaki Dian memiliki 7 cabang lampu sebagaimana lambang dan peralatan rohani yang tercantum dalam Alkitab. Letaknya yang sangat strategis membuat monumen tersebut terlihat dengan sangat jelas dari Airmadidi dan sekitarnya. Dari Kaki Dian, pengunjung dapat melihat dengan sangat jelas panorama Kota Manado, Teluk Manado dan pulau-pulau di sekelingnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Yang menjadi focus pada penelitian ini adalah mengenai Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara dalam Pengembangan Objek Wisata Menara Tujuh Kaki Dian dengan menggunakan teori Gamal (2004) unsur pokok atau aspek-aspek pokok yang harus mendapatkan perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata yakni:

1. Obyek dan Daya Tarik Wisata
2. Prasarana Wisata dan Sarana
3. Masyarakat/Lingkungan (Manusia, Budaya dan Lingkungan)

dalam penelitian ini adalah stakeholders (pihak terkait) yang memungkinkan memberikan data dalam penelitian yaitu :

- Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara
- Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Wisata Budaya Dan Alam
- Pimpinan PD Klabat (1 orang)
- Masyarakat sekitar (3 Orang)
- Masyarakat yang pernah berkunjung (3 orang)

Hasil Penelitian

4.3.1. Obyek dan Daya Tarik Wisata

Objek wisata adalah Objek yang berarti bentuk dan Wisata adalah fasilitas yang berhubungan dengan bentuk tersebut, yang dapat menarik minat pengunjung atau wisatawan untuk datang ke tempat objek tersebut. Daya tarik suatu bentuk atau suatu tempat yang potensial, tapi belum

dikembangkan atau dikelola, belum dapat disebut objek wisata. Daya tarik wisata sejatinya merupakan kata lain dari objek wisata, namun sesuai peraturan pemerintah Indonesia tahun 2009 kata objek wisata sudah tidak relevan lagi untuk menyebutkan suatu daerah tujuan wisatawan maka digunakanlah kata "Daya Tarik Wisata". Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan tercantum bahwa Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sarana atau tujuan kunjungan wisatawan. Objek wisata dan daya tarik wisata memiliki dua karakteristik yang berbeda, dalam Kesrul, 2003:34 menjelaskan :

1. Objek wisata dan daya tarik wisata yang bersifat alami natural yang berarti objek wisata dan daya tarik wisata sudah terjadi sebelum manusia dilahirkan atau terjadinya karena kondisiperubahan alam, contoh: gunung, pantai, hutan, dan danau.
2. Objek wisata dan daya tarik wisata buatan manusia man made serta perpaduan antara buatan manusia dan alami, contoh: Pelabuhan Alam Cilacap, Tembok Raksasa Cina, dan Candi Borobudur.

Selain itu, wisata dapat pula dibedakan bentuknya sehingga dikenal: i. Atraksi wisata alam ii. Atraksi wisata sejarah iii. Atraksi wisata budaya, Dalam Kesrul 2003:34. Dari kedua defenisi Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata di atas, maka Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata adalah suatu hal yang indah dan unik dimana dapat membuat orang selalu tertarik untuk mengunjungi tempat wisata itu, baik hal itu berupa benda abstrak maupun nyata.

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada objek wisata menara tujuh kaki dian yang secara teori adalah objek wisata buatan manusia yang dipadukan dengan alam seperti yang dicontohkan diatas, menara tujuh kaki dian berada di ketinggian bukit yang menawarkan pemandangan alam yang indah dan kemudian dibuatkan menara tujuh kaki dian yang dapat terlihat dari kejauhan

dan merupakan objek yang menjadi daya Tarik wisatawan.

Berkaitan dengan peran pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam pengembangan objek wisata menara tujuh kaki dian, peneliti mewawancarai pihak dinas pariwisata selaku pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara.

Peneliti mewawancarai Kepala dinas Bapak Audy Sambul yang diwakili oleh kepala bidang pengembangan destinasi wisata dinas pariwisata kabupaten Minahasa utara Bapak. R.T, dalam rangka pengembangan obyek dan daya Tarik pariwisata, beliau mengatakan:

Dalam rangka pengembangan objek wisata, kami dari dinas pariwisata melakukan beberapa langkah yakni dengan pengembangan objek tersebut, namun objek wisata di Minahasa Utara kebanyakan bertemakan alam dan sejarah seperti pantai pall, waruga, pulau lihaga, pulau gangga, air terjun, menara tujuh kaki dian dan masih ada banyak lagi pantai yang dijadikan objek wisata. Khusus untuk objek wisata menara tujuh kaki dian, untuk meningkatkan daya Tarik objek menara tujuh kaki dian dalam beberapa tahun lalu kami membuat promosi melalui media massa dan media elektronik, namun diakui sejak beberapa tahun terakhir objek tersebut sudah begitu diperhatikan meskipun tetap ada upaya dari dinas untuk mengadakan promosi melalui perbaikan infrastruktur pendukung karena memang objek ini sudah dikenal banyak orang.

pernyataan diatas didukung oleh kepala seksi pengembangan destinasi wisata budaya dan alam, Bpak. K.L beliau mengatakan:

objek wisata menara tujuh kaki dian dulunya adalah objek andalan dari pemerintah kabupaten minahasa utara di zaman ibu vonny panambunan periode pertama menjadi bupati, dimasa itu pembangunan dan promosi besar-besaran dilakukan, namun begitulah seiring dengan permasalahan bupati dan juga pergantian bupati objek tersebut sudah jarang

diperhatikan karena anggarannya sudah digeser ke hal lain.

Berwisata merupakan salah satu kebutuhan sekunder yang harus dipenuhi manusia selain kebutuhan utamanya. Kebutuhan untuk berwisata merupakan kebutuhan yang dipenuhi untuk memberikan kenyamanan (faktor amenities). Bahkan menurut Reksohadiprojo (1985), faktor amenities merupakan faktor permintaan (yang menarik) yang mendorong perkembangan kota, misal rekreasi yang banyak, fasilitas publik, tidak terdapatnya pencemaran dan lain-lain. Kebutuhan ini sangat berguna untuk mengurangi kepenatan selama menjalankan aktivitas sehari-hari. Berdasarkan Sapta Kebijaksanaan Pengembangan Pariwisata berisi tujuh hal yang merupakan strategi pengembangan pariwisata nasional, tujuh kebijakan itu adalah promosi, aksesibilitas, pengembangan kawasan pariwisata, wisata bahari, produk wisata, sumber daya manusia, dan kampanye nasional sadar wisata. Bagi sebagian besar orang di kota besar, wisata dipegunungan merupakan alternatif yang disukai karena merupakan tempat yang alami, nyaman, indah dan relatif murah.

Selanjutnya peneliti mewawancarai informan dari masyarakat mengenai daya Tarik objek wisata menara tujuh kaki dian, peneliti mewawancarai Ibu. S.H. seorang pengujung, beliau mengatakan:

Menara tujuh kaki dian dulunya dirawat dengan baik oleh pemerintah, namun sekarang tidak lagi, terlihat dari kurangnya minat masyarakat untuk datang ke tempat ini, ditambah lagi kondisi pandemic saat ini, maka focus pemerintah dan masyarakat tidak lagi datang di tempat yang tidak terawatt. Sangat disayangkan karena objek ini sudah menyita anggaran yang cukup besar waktu dibangun dan sempat menjadi icon dari minahasa utara. Saya datang kemari hanya sekedar melepas kelelahan dan refreshing saja, tapi tidak lama disini karena sepi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan tersebut, peneliti menilai bahwa objek wisata menara tujuh kaki dian

di Kabupaten Minahasa Utara, tidak menarik lagi bagi masyarakat dikarenakan focus pemerintah tidak lagi mengelola objek tersebut dan terkesan terbengkalai. Tindakan pemerintah daerah sejauh ini hanya sebatas formalitas saja dan tidak melakukan kegiatan promosi atau meningkatkan daya Tarik objek tersebut, munculnya objek wisata lain yang lebih menarik perhatian masyarakat menjadikan objek menara tujuh kaki dian terabaikan dan focus pada objek lainnya.

4.3.2. Prasarana Wisata dan Sarana

Sarana dan prasarana pariwisata yang lancar merupakan salah satu indikator perkembangan pariwisata. Sarana/prasarana diartikan sebagai proses tanpa hambatan dari pengadaan dan peningkatan hotel, restoran, tempat hiburan dan sebagainya serta prasarana jalan dan transportasi yang lancar dan terjangkau oleh wisatawan. Tim Peneliti PMB-LIPI (2006:339).

Prasarana (*infrastructures*) adalah semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya. Suwanto (2004:21).

Sarana kepariwisataan (*tourism infrastructure*) adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar prasarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang serta dapat memberikan pelayanan pada wisatawan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang beraneka ragam . Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Suwanto (2004:22)

Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata maupun objek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sarana wisata secara kuantitatif menunjuk pada jumlah sarana wisata yang

harus disediakan, dan secara kuantitatif yang menunjukkan pada mutu pelayanan yang diberikan dan yang tercermin pada kepuasan wisatawan yang memperoleh pelayanan. Dalam hubungannya dengan jenis dan mutu pelayanan sarana wisata di daerah tujuan wisata telah disusun suatu standar wisata yang baku, baik secara nasional dan secara internasional, sehingga penyedia sarana wisata tinggal memilih atau menentukan jenis dan kualitas yang akan disediakan.

Berdasarkan teori dan konsep yang membahas mengenai pentingnya sarana dan prasarana dalam menunjang sebuah objek wisata tersebut, peneliti melihat hal serupa juga dibutuhkan dalam pengembangan objek wisata menara tujuh kaki dian yang ada di Minahasa Utara.

Selanjutnya peneliti mewawancarai informan Kepala Bidang Pengembangan Wisata Dinas Pariwisata Minahasa Utara, beliau menerangkan sebagai berikut:

Dalam mengembangkan objek wisata di Kabupaten Minahasa Utara kami melakukan beberapa kegiatan seperti membangun jalan, lahan parkir dan juga sarana gedung penunjang untuk kenyamanan pengunjung, khusus untuk objek wisata menara tujuh kaki dian, untuk saat ini kami hanya melaksanakan perawatan beberapa bagian saja, karena anggarannya kurang, namun dalam menjalankan selama ini kami bekerjasama dengan BUMD Minahasa Utara yakni PD Klabat untuk mengurus beberapa bagian seperti sampah, lahan parkir, tiket masuk dan kemudian di setorkan ke kas daerah. Jadi mereka sebatas mengurus kegiatan teknis pengelolaan operasional saja namun proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta pertanggungjawabannya ada pada dinas pariwisata minahasa utara.

Dari hasil wawancara tersebut dengan pihak dinas Pariwisata terlihat bahwa ada campur tangan dari pihak BUMD Minahasa Utara yakni PD Klabat dalam pengelolaan, peneliti kemudian mengembangkan penelitian dengan mewawancarai informan dari PD Klabat selaku penanggungjawab beberapa operasional objek Wisata Menara

tujuh kaki dian.

Peneliti mewawancarai Bapak. K.P. seorang pengurus PD. Klabat Minahasa Utara yang dihubungi peneliti melalui telepon genggam, beliau mengatakan:

PD Klabat selaku Perusahaan daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Minahasa utara sebagai BUMD bertugas membantu pemerintah daerah dalam mengurus berbagai keperluan dan aktivitas. Dasar hukum yang menaungi tugas kami berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Utara nomor 26 tahun 2018 tentang Susunan organisasi dan kepengurusan Perusahaan umum daerah Klabat Kabupaten minahasa Utara. Tugas kami membidangi penagihan retribusi pasar, kebersihan pasar dan objek wisata, dan keamanan unit-unit usaha serta usaha lain yang diberikan pemerintah daerah untuk dikerjakan.

Peneliti kemudian bertanya mengenai hubungan PD Klabat dengan pengembangan objek wisata Menara tujuh kaki dian, beliau menjawab:

Dalam pengembangan objek wisata khususnya bagi PD Klabat sendiri, kami hanya menjalankan operasional objek tersebut sesuai dengan permintaan dan tugas kami, namun secara penuh pengambilan keputusan, pembangunan, promosi itu dari dinas pariwisata. Melalui tugas kami mengatru lahan parkir, kebersihan hal tersebut bisa mengembangkan objek tersebut, namun sayangnya tempat tersebut sudah jarang diperhatikan, memang masih ada pengunjung tapi tidak seperti dulu, apalagi ada pandemi covid 19 semakin memperparah keadaan saran dan prasarana yang ada.

Peneliti juga mewawancarai informan masyarakat pengunjung yakni Sdri O.L. mengenai keadaan sarana di menara tujuh kaki dian, beliau mengatakan:

Keadaan sarana dan prasarana di menara tujuh kaki dian, tidak begitu terawat, ada beberapa bangunan yang tidak terpakai, sebagian WC juga rusak sehingga tidak layak lagi dipakai, saya rasa perlu adanya kepedulian dari pemerintah untuk mengembangkannya.

Menurut Lothar A.Kreck dalam (Yoeti, 1996:197) Sarana kepariwisataan terbagi atas :

1. Sarana pokok kepariwisataan, yang dimaksud dengan sarana pokok kepariwisataan adalah perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat tergantung kepada arus kedatangan orang yang melakukan perjalanan wisata, termasuk ke dalam kelompok ini adalah: *travel agent* dan *tour operator*, perusahaan- perusahaan angkutan wisata, hotel dan jenis akomodasi lainnya, bar dan restoran, serta rumah makan lainnya, objek wisata, dan atraksi wisata lainnya.
2. Sarana pelengkap kepariwisataan, yaitu perusahaan- perusahaan atau tempat-tempat yang menyediakan fasilitas untuk rekreasi yang fungsinya tidak hanya melengkapi sarana pokok kepariwisataan dapat lebih lama tinggal pada suatu daerah tujuan wisata. Termasuk kedalam kelompok ini adalah sarana olah raga seperti lapangan tenis, lapangan golf, kolam renang, permainan bowling, daerah perburuan, berlayar, berselancar, serta sarana ketangkasan seperti permainan bola sodok, *Jackpot*, *Pachino*, dan *amusement* lainnya.
3. Sarana penunjang kepariwisataan, yaitu perusahaan yang menunjang sarana pelengkap dan sarana pokok dan berfungsi tidak hanya membuat wisatawan lebih lama tinggal pada suatu daerah tujuan wisata, tetapi fungsi yang lebih penting adalah agar wisatawan lebih banyak mengeluarkan atau membelanjakan uangnya di tempat yang dikunjungi

Berdasarkan penelitian melalui wawancara dengan para informan diatas peneliti menyimpulkan bahwa keadaan sarana dan prasarana penunjang pada objek wisata menara tujuh kaki dian, tidak diperhatikan dengan baik oleh pemerintah daerah, hal tersebut dikarenakan kondisi pandemic covid 19, dan kurangnya anggaran yang tersedia. Selain itu pengelolaan objek

wisata tersebut juga dikelola oleh PD Klabat membantu dinas pariwisata mengurus parkir dan kebersihan objek tersebut. Namun perannya hanya sebatas itu saja untuk pengembangan dan pengambilan keputusan sepenuhnya ada pada Pemerintah Daerah dan dinas pariwisata kabupaten minahasa utara.

4.3.3. Masyarakat/Lingkungan (Manusia, Budaya dan Lingkungan)

Lingkungan dilihat dari konsep ekologi adalah suatu hubungan timbal balik dan intraksi antara manusia dengan alam sekitarnya serta dampak yang terjadi dari interaksi tersebut. Lingkungan tidak selalu statis akan tetapi selalu mengalami perubahan secara dinamis baik dilakukan oleh perilaku manusia maupun alam itu sendiri. Bentuk dan tujuan wisata akan berpengaruh terhadap perubahan ekosistem suatu wilayah. Perubahan itu akibat suatu interaksi antara wisatawan, masyarakat dan alam itu sendiri dalam dimensi social, budaya dan ilmu pengetahuan. Daya dukung lingkungan sangat mempengaruhi bentuk dan tujuan pariwisata, meliputi: wilayah (abiotik), potensi sumber daya alam (biotic) dan sikap perilaku masyarakat (culture) serta ada tidaknya suatu keunikan. Perubahan itu bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak negative. Dampak positif dari pariwisata seperti: meningkatkan devisa Negara, meningkatkan perekonomian masyarakat, terjadi arus informasi dan teknologi, menstimulasi sektor yang lain. Dampak negative pariwisata seperti: marginalisasi budaya, pergeseran budaya, konsumerisme masyarakat, pariwisata dimiliki investor, alih fungsi lahan, pencemaran lingkungan.

Lingkungan tidak selalu “statis” akan tetapi mengalami perubahan secara “dinamis”, perubahan itu terjadi akibat suatu interaksi dalam dimensi social, budaya maupun ilmu pengetahuan. Selain itu alam pun bisa mempengaruhi suatu perubahan lingkungan baik secara cepat (revolusioner) maupun lambat (evolusione) seperti bencana alam gunung meletus, banjir, tsunami, pencemaran, perubahan musim (global warning) dll. Hampir sebagian besar

perubahan lingkungan hidup dipengaruhi oleh ulah dan perilaku manusia selain alam itu sendiri. Pariwisata sangat peka dengan kondisi lingkungan seperti: pencemaran, sanitasi buruk, sikap ramah tanah masyarakat, estetika lingkungan, keamanan dll.

Dalam pengembangan objek wisata menara tujuh kaki dian Kabupaten Minahasa Utara, keberadaan masyarakat dan lingkungan sekitar sangat berpengaruh, karena peranan, fungsi dan kedudukan manusia sangat penting dalam mengatur tata nilai lingkungan, karena manusia mempunyai kemampuan dalam mengelola, memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan lingkungannya demi kelangsungan hidupnya. Manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesama, alam dan lingkungannya. Manusia tidak bisa menciptakan alam akan tetapi hanya bisa mengelola, memanfaatkan dan mengembangkan, untuk itu diperlukan suatu kearifan yang bijaksana dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam.

Untuk mengetahui peran dari pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata tujuh kaki dian khususnya dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekitar objek wisata, peneliti mewawancarai informan masyarakat yakni Ibu. K.R. warga dekat objek wisata beliau mengatakan:

Selaku masyarakat dekat objek wisata biasanya dilibatkan dalam menjaga dan melindungi objek wisata, sebelumnya kami dilibatkan dalam menjaga menara tujuh kaki dian, dan kami juga diberikan kesempatan untuk berjualan di tempat tersebut, namun sejak kurangnya pengunjung dan kurangnya perhatian dari pemerintah, jadi kami sudah tidak lagi banyak beraktivitas disana.

Pernyataan dari ibu K.R. di perkuat oleh bapak. G.P. yang menyatakan bahwa

Keberadaan kami dalam rangka pengembangan objek wisata menara tujuh kaki dian pada awal pembangunan dan dibuka, kami berjualan disekitaran tempat wisata, namun karena semakin berkurangnya

pengunjung dan juga pandemic jadi, kami sudah tidak lagi berjualan.

Pariwisata berbasis masyarakat sebagai sebuah pendekatan pemberdayaan yang melibatkan dan meletakkan masyarakat sebagai pelaku penting dalam konteks paradigma baru pembangunan yakni pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development paradigma) pariwisata berbasis masyarakat merupakan peluang untuk segenap potensi dan dinamika masyarakat, guna mengimbangi peran pelaku usaha pariwisata skala besar. Pariwisata berbasis masyarakat tidak berarti merupakan upaya kecil dan lokal semata, tetapi perlu diletakkan dalam konteks kerjasama masyarakat secara global. Pola pembinaan pemberdayaan masyarakat menitikberatkan kepada partisipasi masyarakat, agar masyarakat dapat diajak terlibat guna mengarahkan kegiatan yang berhubungan langsung dengan mereka.

Berdasarkan penelitian mengenai peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat, melalui wawancara dengan pihak masyarakat didapati bahwa keberadaan masyarakat memang diberdayakan dalam proses pengembangan pariwisata di objek menara tujuh kaki dian, namun sejak berkurangnya pengunjung dan tidak terawatnya objek serta pandemic mengakibatkan eksistensi masyarakat menjadi berkurang pada objek wisata tersebut.

Kesimpulan

1. Peran Pemerintah daerah melalui dinas pariwisata dalam mengembangkan objek dan daya Tarik wisata menara tujuh kaki dian Minahasa Utara, sejauh ini tidak maksimal karena keberadaan objek tersebut sekarang ini terkesan dibiarkan dan tidak diurus. Pergantian pemimpin, anggaran serta pandemic covid 19 menjadi alasan kurangnya perhatian dinas pariwisata terhadap pengembangan objek dan daya Tarik objek wisata
2. Keberadaan sarana dan prasarana penunjang objek wisata di menara tujuh kaki dian masih dalam kondisi yang butuh perbaikan, pengelolaan objek sebagian

ditangani oleh PD Klabat selaku BUMD Minahasa Utara yang mengelola kebersihan dan parkir, selain itu tidak ada kewenangan lebih dari PD Klabat. Dinas pariwisata belum bisa berbuat banyak mengingat kebijakan dan anggaran yang harus diputuskan selevel diatas mereka.

3. Keberadaan masyarakat dan lingkungan dalam pengembangan objek wisata cukup berpengaruh, oleh sebab itu pemerintah daerah sebelumnya telah memberdayakan keberadaan masyarakat sekitar dengan memberikan kesempatan menjaga dan berjualan di sekitar objek wisata serta membuat sarana penunjang guna menunjang aktivitas masyarakat sekitar.

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sebaiknya mengkaji kembali mengenai pengembangan objek wisata menara tujuh kaki dian dengan menganalisis terlebih dahulu mengenai kekurangan, kelebihan serta peluang dan tantangan mengenai objek tersebut, kemudian mengadakan perbaikan sarana dan promosi mengenai objek wisata sambil menunggu pandemic covid 19 berlalu.
2. Disarankan kepada Pemerintah Daerah untuk menganggarkan perbaikan sarana dan prasarana penunjang pada objek pariwisata menara tujuh kaki dian, yang sebenarnya objek tersebut memiliki daya Tarik bagi wisatawan baik local maupun mancanegara, perbaikan prasarana juga diikuti dengan perbaikan manajemen pengelolaan yang baik. PD Klabat tetap dilibatkan guna mengelola objek tersebut.
3. Peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat sekitar dan lingkungan juga perlu diperhatikan dan didayagunakan untuk pengembangan objek wisata menara tujuh kaki dian, dengan adanya pemberdayaan masyarakat dan lingkungan, maka pengembangan objek wisata tersebut bisa dimaksimalkan.

Daftar Pustaka

- Antariksa*, Basuki. 2016 Kebijakan Pembangunan Keparawisataan. Malang: Intrans Publishing
- Arimbi, Achmad Santosa, 2008, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Walhi.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta
- Gamal Suwanto. (2009). Dasar-dasar Pariwisata. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Hoessein B, 2012, "Kebijakan Desentralisasi", Jurnal Administrasi Negara Vol. II. No.02. Maret. 2002
- Huda N.2012, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia: Bandung
- La Ode Bariun, 2015. *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar
- Maulina S.N. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya
- Moleong, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Ndraha, Taliziduhu. 2012. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jilid 1-2. Rineka Cipta. Jakarta
- Nugroho, Iwan. 2012. Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sarundajang, 2011. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah* cetakan ke 3, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
- Siagian.Sondang P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara. Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: P.T.Raja Grafindo.
- Sugiyono. 2014. Memahami penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Syafii I.K.,2010 *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Wahab S. 2003. Manajemen Pariwisata. Jakarta. Pradnya Paramitha
- Yoeti, Oka A, dkk. 2006. Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung : Angkasa

Sumber Undang-undang:

- Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Sumber Jurnal-Jurnal dan lainnya:

- Philip L., K. 2009. Test Length and Cognitive Fatigue: An Empirical Examination of Effects on Performance and Test-Taker Reaction. *Journal of Experimental Psychology*, 15(2): 163-181.
- Retnami S. 2010. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia.
- Primadany, Ryalita Sefira, Mardiyono, Riyanto. 2013. Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 4, Hal. 135-143.
- Profil Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara